

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. dan Ali Sufa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, 2006, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan MK RI, hal. 170.  
[http://www.pusdikmin.com/perpus/file/TEORI\\_HANS\\_KELSEN\\_TENTANG\\_HUKUM.pdf](http://www.pusdikmin.com/perpus/file/TEORI_HANS_KELSEN_TENTANG_HUKUM.pdf)
- Babbie, E. *The Practice of Social Research*, (Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1989), hal. 81
- Bhisma, Murti, 2000, *Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan*. Yogyakarta: Kanisius
- BPJS Kesehatan, 2016, "Info BPJS Kesehatan: Pentingnya Dukungan Pemda Untuk Mencapai Universal Health Coverage." *BPJS Kesehatan*, 3-4, <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/4dc1390e3f9ad849198c0321a7c4bdc0.pdf>.
- Denzin, N. K. dan Yvonna S. Lincoln (ed.), *Handbook fo Qualitative Research Research*, (California: Sage Publication, 1994), hal.1.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. 2ed ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firmansyah H, Clinical Pathway : Integrasi pendokumentasian Berbagai Disiplin Ilmu Kesehatan Di Dalam Rumah Sakit, <https://dokumen.tips/documents/clinical-pathway-569121a0b8969.html>, diakses 6 Desember 2022
- Hardianto. D, 2022, *Prinsip Ekuitas Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di RS Misi Lebak Banten Melalui Kendali Mutu Kendali Biaya*, <http://repository.unika.ac.id/29444/>
- INFO BPJS Kesehatan, 2015, Media Internal Resmi BPJS, *Tindak Kecurangan (Fraud) merugikan JKN (Negara)*, E disi 29, Nopember 2015, hal : 3
- Internet 25 Nopember 2022, <https://www.djsn.go.id/sjsn/asas-tujuan-dan-prinsip-sjsn>
- KementerianKesehatan Republik Indonesia, 2013, "BPJS Kesehatan Buku Saku Faq".
- Lofland, J., dan Lyn H. Lofland, 1984, *Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis*, Belmont: Wadsworth Publishing Company

Macquarie Dictionary, tt, Kevin Weldon Production.

Monitoring dan Evaluasi,

<https://siencang.bekasikota.go.id/monev/2022/public/blogs/monev>, diakses  
18 Nopember 2022

Mukti AG, 2007, *Reformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan di Indonesia Dan Proses Ke Depan*. PT karya Husada Mukti.

Mukti, A G, 2007, *Strategi Terkini Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Konsep Dan Implementasi*. 1st ed. Yogyakarta: PT Karya Husada Mukti.

Pohan, Imbalo S, 2003, *Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar-Dasar Pengertian*. 1st ed. Bekasi: Kesaint Blanc.

Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Cet. Ke 3, Yogyakarta: Genta Publishing

RH Pakpahan, Eka N.A.M Sihombing, 2012, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial*, Jurnal Legislasi Vol 9, no. 2 : 163–174.

Sailendra A, 2020, *Langkah-langkah Praktis Membuat SOP (Standar Operating Procedures)*, Yogyakarta : Trans Idea Publishing, 2020

Sutoto, Lumenta.NA, 2017, *Manajer Pelayanan pasien - MPP (Case Manager)*, Jakarta : Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Edisi II (Revisi).

Sutoto, *Clinical Pathway Sebagai Kendali Mutu Dan Biaya Dalam Sistem Pembiayaan BPJS*, diakses 15 Nopember 2002, dari [https://persi.or.id/wp-content/uploads/2018/04/kendali\\_mutu\\_biaya.pdf](https://persi.or.id/wp-content/uploads/2018/04/kendali_mutu_biaya.pdf)

Thabrany, H, 2015, *Jaminan Kesehatan Nasional*, Edisi 2, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Wahyuningsih D, *Monitoring dan Evaluasi untuk tercapainya tujuan kinerja*, 07 Pebruari 2022, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14702>. 18 Nopember 2022

WHO Constitution, BASIC DOCUMENT, edisi ke empat puluh sembilan, 1 April 2020

Wilkes G.A & W. A. Krebs, 1988, *The Collins Consice Dictionary of the English Language*, Edisi Kedua, London and Glasgow: Collins, hal. 1200

Wilardjo, Liek, tt, “Ilmu dan Teknologi,” dalam *Ilmu dan Teknologi*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, bunga rampai tidak diterbitkan.

Yulianti. A, *Pentingnya Clinical Pathway Bagi Fasilitas Kesehatan*, diakses dari Internet 18 Nopember 2022, <http://mutupelayanankesehatan.net/accordion-a/level-2/19-headline/3810-pentingnya-clinical-pathway-bagi-fasilitas-kesehatan>

## PERATURAN PERUNDANGAN

RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

RI, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

RI, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

RI, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

RI, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

RI, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

RI, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

RI, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 378/MENKES/PER/V/1993 Tentang pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta

RI, Peraturan Menteri Nomor 971/Menkes/Per/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan.

RI, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971/Menkes/Per/XI/2009

RI, Peraturan Presiden Republik Indonesia No 12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan

RI, Peraturan Presiden Republik Indonesia No 82 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan

RI, Peraturan Menteri Kesehatan No 1438/Menkes/Per/IX/2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran

- RI, Peraturan Menteri Kesehatan No 755/Menkes/Per/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medis Di Rumah Sakit
- RI, Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
- RI, Peraturan Menteri Kesehatan No 69 Tahun 2013 Tentang Standat Tarif Pelayanan Kesehatan pada FKTP dan FKTL Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- RI, Peraturan Menteri Kesehatan No 27 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Sistem INA-CBG's
- RI, Peraturan Menteri Kesehatan No 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional
- RI, Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (Clinical Advisory)
- RI, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit
- RI, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/Menkes/659/2017 Tentang Formularium Nasional
- Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No 8 Tahun 2016 Tentang Penerapan Kendali Mutu dan Kendali Biaya Pada Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional
- Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No 6 Tahun 2020 Tentang Sistem Pencegahan Kecurangan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
- Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) atau *Universal Independent of Human Right* 10 Desember 1948